

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

International Organization for Migration (IOM) adalah salah satu Organisasi Pemerintah (IGO) yang berfokus pada bidang Migrasi. IOM bekerja bersama PBB & Aktor non pemerintah. IOM berdiri pada tahun 1951 dengan tujuan untuk mempromosikan hak asasi imigran serta menyediakan layanan manajemen migrasi & saran bagi pemerintah. IOM juga mempromosikan kerjasama internasional dalam isu migran melalui hukum internasional, kebijakan, panduan, perlindungan hak asasi migran dan kesehatan migran (IOM, 2022).



Gambar 1.1 Logo IOM

<sup>1</sup> Diakses pada 16 Januari 2023, Pukul 13:34 <https://smartwatermagazine.com/international-organization-migration-iom>

Pada awalnya organisasi ini dibuat untuk mengembalikan pengungsi Eropa pasca Perang Dunia II. IOM pertama kali dikenal dengan nama Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME). Pada tahun 1952 organisasi ini berganti nama menjadi Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) yang berkantor pusat di jantung kota Jenewa, Swiss. Kemudian berubah menjadi Intergovernmental Committee for Migration (ICM). Akhirnya berubah menjadi IOM dari tahun 1989 sampai sekarang (IOM, 2022).

IOM mendukung para migran di seluruh dunia, mengembangkan respons yang efektif terhadap dinamika perpindahan migrasi, serta menjadi pedoman utama mengenai kebijakan dan praktik migrasi. Organisasi ini bekerja dalam situasi darurat, mengembangkan ketahanan bagi pengungsi, dan khususnya pengungsi yang berada dalam situasi rentan, serta membangun fondasi dalam pemerintahan untuk mengelola segala bentuk dan dampak mobilitas. Organisasi ini menganut prinsip-prinsip yang termaktum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penghormatan terhadap hak, martabat, dan kesejahteraan para migran (IOM, 2022).

India menjadi Negara Anggota IOM pada 18 Juni 2008. Sejak itu, IOM di India telah melaksanakan beberapa proyek di berbagai bidang, termasuk kontra-perdagangan manusia, migrasi tenaga kerja, dan bantuan migran (IOM, 2022).

Salah satu yang ditangani IOM adalah kasus migran di India setelah pengesahan CAA 2019, dalam menjalankan tugasnya IOM mengacu pada Konvensi Pengungsi 1951 yakni sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi, mengatur hak-hak imigran dalam memperoleh suaka. Konvensi ini juga mengatur mengenai kriteria imigran, migran korban perang, perpindahan kewarganegaraan, dokumen perjalanan.

India adalah rumah bagi sekitar dua ratus juta migran Muslim, salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi menjadi kelompok minoritas terbesar di negara mayoritas Hindu itu. Sejak kemerdekaan India pada 15 Agustus 1947, umat muslim telah menghadapi diskriminasi, prasangka, dan kekerasan sistematis, meskipun dengan adanya perlindungan konstitusional (Maizland, 2022).

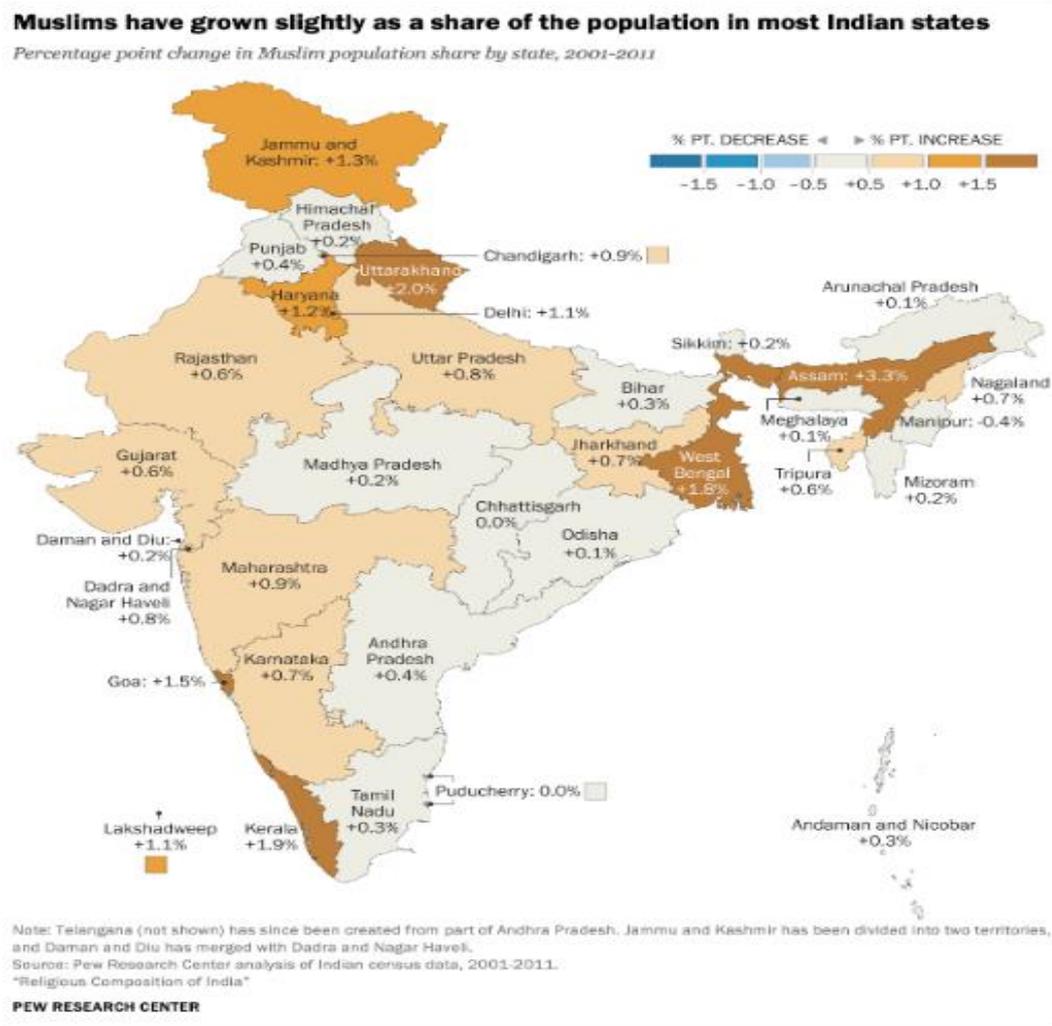
Para ahli mengatakan sentimen anti-Muslim telah meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang mengejar agenda nasionalis Hindu sejak terpilih untuk berkuasa pada tahun 2014. Sejak terpilihnya kembali Modi pada tahun 2019, pemerintah telah mendorong kebijakan kontroversial yang menurut para kritikus secara eksplisit mengabaikan hak-hak Muslim dan dimaksudkan untuk mencabut hak jutaan Muslim. Di bawah

---

<sup>1</sup> Maizland, Lindsay, *India's Muslims: An Increasingly Marginalized Population*, Council Foreign Relation, 2022

Modi, kekerasan terhadap Muslim menjadi lebih umum. Langkah tersebut telah memicu protes di India dan mengundang kecaman internasional (Maizland, 2022).

India adalah negara dengan keragaman agama, etnis, dan bahasa. Diperkirakan dua ratus juta Muslim, yang sebagian besar diidentifikasi sebagai Sunni, berjumlah sekitar 15 persen dari populasi, sejauh ini merupakan kelompok minoritas terbesar. Hindu membentuk sekitar 80 persen dari populasi. Komunitas Muslim negara itu beragam, dengan perbedaan bahasa, kasta, etnis, dan akses ke kekuatan politik dan ekonomi. Berikut adalah data pertumbuhan penduduk muslim di India (Maizland, 2022).



Gambar 1.2 Peta Persebaran Muslim di India

2 Sumber: Census of India, Retrieved from Pew Research Center

Sentimen dan diskriminasi terhadap muslim terjadi di berbagai bidang termasuk pekerjaan, pendidikan, dan lingkungan masyarakat, umat muslim juga menghadapi hambatan untuk mencapai kekuatan politik dan kekayaan, dan kekurangan akses ke perawatan kesehatan serta layanan dasar. Selain itu, mereka sering berjuang untuk mendapatkan keadilan setelah mengalami diskriminasi, meskipun ada perlindungan konstitusional (Cause, 2019).

Selama dua dekade terakhir, perwakilan Muslim di parlemen mengalami stagnasi: setelah pemilu 2019, Muslim hanya menduduki 5 persen kursi di parlemen. Itu sebagian karena kebangkitan BJP, yang pada pertengahan 2022 tidak memiliki anggota Muslim dari partainya di parlemen (Cause, 2019).

Salah satu faktor penyebab terjadinya diskriminasi ini adalah menguatnya “Nasionalisme Hindu”. Kaum nasionalis Hindu percaya bahwa umat Hindu adalah “putra sejati tanah” karena tanah suci mereka berada di India, sedangkan tanah suci Muslim berada di luarnya. Mereka umumnya

memperjuangkan kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadikan India sebagai negara Hindu. Banyak yang melihat kelompok Muslim India sebagai orang asing yang dicurigai (Cause, 2019).

Selama kurun waktu 66 Tahun, Pemerintah India mengatur terkait undang-undang kewarganegaraan melalui Citizen Amendment Act 1955. Dalam penerapannya, masyarakat India hidup berdampingan dalam perbedaan suku, etnis, agama tanpa adanya konfrontasi yang terjadi pada setiap elemen masyarakat. Kemudian, pada tahun 2019, kebijakan Citizen Amendment Act ini diamandemen ulang oleh Dewan Negara (Rajya Sabha). Perdana Menteri India, Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), mengusulkan perubahan undang-undang pada pasal pengaturan imigran ilegal saat ingin mendapatkan status kewarganegaraan India.

Perubahan amandemen ini menjadi kontroversial karena pemerintah India mengabaikan kelompok minoritas Muslim – dari negara tetangga seperti Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan. Undang-undang ini hanya memberikan kemudahan akses untuk mendapat kewarganegaraan India kepada kelompok selain Muslim.

Dalam kasus ini, penulis akan berfokus kepada perpindahan penduduk Muslim dari negara Afghanistan yang mengalami tensi politik internal akibat tekanan Taliban, kelompok oposisi ekstrimis yang ingin menggulingkan pemerintahan, mengubah ideologi negara dengan jalur pemberontakan bersenjata. Sejak 2019, tercatat sekitar 40.000 imigran dari Afghanistan mendaftarkan diri menjadi warga negara India. Perpindahan secara agresif ini, timbul karena ketakutan masyarakat dimana Taliban akan menghapus hak-hak sipil, terutama kaum perempuan yang dicapai dalam beberapa dekade pasca invasi Amerika pada tahun 2001 (Jazeera, 2020).

Untuk kemudian menjadi inisiator kasus imigran ini, ikut terlibat International Organization of Migration (IOM). IOM adalah sebuah organisasi yang bekerja atas nama pemerintahan negara (Intergovernmental Organization) yang memiliki spesialisasi dalam isu migrasi. Berdiri sejak 1951, IOM berperan dalam mengawasi migrasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hak-hak asasi kemanusiaan (IOM, 2022).

## B. Rumusan Masalah

Disesuaikan dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis menyimpulkan suatu rumusan masalah

**“Strategi apa yang dilakukan International Organization For Migration (IOM) di India setelah pengesahan Citizenship Amendment Act pada Tahun 2019”**

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Rezim Internasional

Rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan, norma, prinsip, aturan, proses pembuatan keputusan, yang bersifat eksplisit maupun implisit, dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional. Contoh rezim internasional adalah International Organization for Migration (Hasenclever, 1997).

Teori rezim membantu menjelaskan bagaimana terciptanya pergaulan serta pola perilaku aktor negara, perusahaan, organisasi dan lembaga lainnya dapat terbentuk. Interaksi antara aktor ini menghasilkan Kerjasama melalui rezim, Ada 4 hal fundamental yang menjadi ciri dari rezim internasional:

- a. **Prinsip** adalah kepercayaan atas pendirian, fakta, kejujuran dan kebenaran
- b. **Norma** adalah standar perilaku yang dianut
- c. **Peraturan** adalah ketentuan dan larangan yang mengatur sebuah perilaku
- d. **Pengambilan** Keputusan, yakni praktik dalam implementasi hasil dari keputusan bersama

Dengan adanya 4 dasar fundamental yang dianut rezim internasional, diharapkan dapat membantu aktor negara maupun non negara dalam membuat kerjasama (Hasenclever, 1997).

Berdasarkan teori ini, aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara yang memiliki peran dalam mempengaruhi politik internasional. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada perilaku negara yang mempengaruhi norma serta aturan yang dianut oleh organisasi internasional yang pada akhirnya menciptakan suatu perilaku pada organisasi tersebut. Norma, aturan dan

prosedur dalam pembuatan keputusan itu berhubungan dengan ekspektasi dan perilaku dari negara.

Hasil dari perilaku tersebut yang ditimbulkan dari organisasi internasional diharapkan juga mempengaruhi aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Berbagai bentuk rezim yang berkembang hingga saat ini pada faktanya juga mengalami sebuah perubahan atau sering disebut dengan transformasi.

Dalam memahami transformasi yang terjadi pada suatu rezim, terdapat paling tidak empat pendekatan studi yang meliputi pendekatan struktural (*hegemonic stability*), *game-theories*, fungsional dan pendekatan kognitif yang memadukan ketiga pendekatan sebelumnya. Pendekatan struktural menyatakan kemungkinan munculnya aktor dominan dalam suatu rezim internasional yang akan leluasa menentukan pola dalam sistem tersebut.

Secara umum, transformasi rezim internasional dapat disederhanakan menjadi:

Pembentukan Rezim → Implementasi Rezim → Tatanan Internasional

Dalam hal ini, IOM sebagai organisasi internasional mengupayakan respon dalam permasalahan krisis imigran yang masuk ke wilayah negara anggotanya yakni India. Operasionalisasi teori rezim internasional dalam studi kasus yang telah dijelaskan, IOM berperan sebagai aktor utama yang menjalankan tatanan norma, aturan, prinsip serta prosedur pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi respon sebuah negara. IOM berperan sebagai rezim internasional, dimana IOM bersama India berkolaborasi dalam menjalankan proses mencapai tatanan migrasi yang sesuai HAM.

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa IOM sebagai aktor hubungan internasional menjalankan sebuah rezim, dimana rezim tersebut diharapkan dapat membantu negara anggota untuk mengelola gelombang migrasi, sekaligus menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh migran.

Organisasi internasional juga dapat berperan dalam membentuk aturan dan norma yang mengatur hubungan internasional. Misalnya IOM menetapkan aturan untuk migrasi internasional & advokasi kasus imigran di dunia internasional (Hasenclever, 1997).

Selain perannya dalam membentuk dan menegakkan aturan dan norma internasional, organisasi internasional juga dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi dan otoritas dalam sistem internasional. PBB, misalnya, dipandang sebagai aktor kunci dalam mempromosikan pemerintahan global dan supremasi hukum. Keanggotaannya mencakup hampir semua negara berdaulat.

Secara keseluruhan, organisasi internasional memainkan peran aktor penting dalam teori rezim internasional dengan menyediakan forum bagi negara untuk bekerja sama dan mengatasi tantangan global, membentuk aturan dan norma yang mengatur hubungan internasional, dan berfungsi sebagai sumber legitimasi dan otoritas dalam sistem internasional.

IOM beroperasi dalam kerangka teori rezim internasional, yang berpendapat bahwa organisasi internasional dan aturan serta norma yang mereka buat dapat memainkan peran penting dalam tata kelola global. Teori rezim berpendapat bahwa organisasi internasional, seperti IOM, dapat membantu mengoordinasikan tindakan negara dan aktor lain, dan menyediakan forum kerja sama dalam isu-isu global.

Salah satu fungsi utama IOM adalah memfasilitasi kerja sama internasional dalam isu migrasi. Ini termasuk memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dalam pengelolaan migrasi, dan mempromosikan penerapan standar internasional dan praktik terbaik di bidang migrasi. IOM juga bekerja untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh migrasi ilegal, dan untuk melindungi hak-hak para migran, termasuk mereka yang rentan atau kurang beruntung.

## 2. Teori Organisasi Internasional

Peranan yang signifikan oleh organisasi internasional sebagai actor dalam hubungan internasional, perlahan mengancam kedudukan negara dalam sistem internasional. Pesatnya perkembangan OI ini disebabkan oleh adanya pergaulan internasional diantara aktor negara & negara. Seiring berjalannya waktu, peran organisasi internasional ini semakin penting, karna OI membuktikan bahwa mereka mampu menjadi pihak ketiga (*Mediator*) dalam penyelesaian sengketa atas konflik tertentu yang tidak terselesaikan oleh negara.

Terdapat berbagai sudut pandang para ahli dalam memandang peranan organisasi internasional →

**Teuku May Rudy**, yang memberikan definisi khusus mengenai organisasi internasional yang berbunyi:

"Organisasi internasional menjadi sebuah pola kajian Kerjasama yang melintasi batas negara, dengan struktur organisasi yang lengkap. Organisasi internasional diproyeksikan untuk dapat mencapai tujuan yang disepakati antara aktor negara & negara. maupun aktor non negara dengan non negara. Dalam kasus imigran di India, IOM bertindak sebagai aktor dependen yang ikut andil dalam penyelesaian kasus.

Adapun konsep organisasi internasional dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. International Governmental Organization (organisasi antar pemerintah) adalah organisasi yang anggota-anggotanya berasal dari perwakilan resmi pemerintah negara-negara di dunia. Contohnya adalah PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) & IOM (International Organization for Migration)
- b. Non Governmental Organization (organisasi non pemerintah) adalah kumpulan dari kelompok swasta yang bergerak dalam bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain.

Menurut **Clive Archer**, peran organisasi internasional terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Instrumen Sarana yaitu organisasi internasional berperan sebagai sarana mencapai kesepakatan, mengurangi intensitas konflik dan menyatukan suara.
- b. Arena Wadah yaitu organisasi internasional untuk berkumpul, memberikan suara dan turut Menyusun keputusan internasional beriringan dengan terbentuknya perjanjian internasional yang dijalankan seluruh negara anggota
- c. Aktor yaitu organisasi internasional juga dapat menjadi aktor independent atau bertindak atas kapasitas sendiri sebagai sebuah entitas organisasi internasional, tanpa harus mengikuti kepentingan dari para anggotanya (Archer, 1983).

Adapun karakteristik yang harus dimiliki organisasi internasional, yaitu:

- a. Keanggotaan  
Sebagai sebuah organisasi wajib beranggotakan 2 atau lebih negara berdaulat.
- b. Tujuan  
Organisasi Internasional didirikan untuk mencapai tujuan bersama dan harapan anggotanya, maka sebuah organisasi tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan satu atau dua anggota saja
- c. Struktur  
Organisasi internasional harus memiliki sebuah struktur yang jelas dalam keanggotaannya

IOM sebagai sebuah organisasi telah memenuhi tiga kriteria yang tersebut. IOM beranggotakan 174 negara merdeka dan beberapa negara pengamat, maka IOM telah memenuhi kriteria yang pertama. IOM memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem migrasi yang manusiawi dan sesuai dengan hak asasi kemanusiaan, maka ini sudah memenuhi kriteria yang kedua. IOM juga memiliki struktur formal yaitu dikomando oleh Direktur Jenderal serta 2 Wakil Dirjen. Ketua & Wakil akan diganti secara berkala sesuai kesepakatan negara anggota, maka kriteria yang ketiga juga sudah terpenuhi.

IOM sebagai *Intergovernmental Organization* (IGO) merupakan delegasi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan migrasi. Persoalan pengesahan CAA 2019 yang diskriminatif terhadap Muslim membuat nama India menjadi tercoreng, maka dari itu India harus menemukan cara penyelesaiannya, di sinilah peran IOM sebagai IGO untuk mengurangi ketegangan serta membantu menangani imigran yang terkena dampak dari kebijakan CAA 2019.

### 3. Teori Peran

Dalam bukunya **Mohtar Mas'ood** "*Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*" bahwa peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang diletakkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi tersebut, diharapkan bersikap sesuai dengan sifat dari posisi itu (Mas'ood, 1989).

Pengertian tersebut menjadikan peranan ini merupakan sebuah tugas khusus yang menjadi alasan terbentuknya sebuah organisasi atau bagaimana kemudian organisasi itu memandang sebuah isu yang sedang berkembang dalam masyarakat luas. Mohtar Mas'ood mendefinisikan

teori peran yakni merupakan organisasi yang menjalankan pelaksanaan dari fungsi serta harapan bagi lingkungan terhadap organisasi tersebut. (Mas' oed, 1989)

Dalam menjalankan fungsi organisasi internasional berupa menyediakan hal-hal yang mendorong kerjasama dan mewujudkan tujuan bersama untuk negara anggotanya, maka terdapat beberapa jenis peran yakni mediator, fasilitator, inisiator dan determinator.

Berdasarkan peran tersebut, terdapat beberapa peran yang relevan dengan IOM dalam menyelesaikan masalah migran di India yaitu Inisiator dan Fasilitator

a. Inisiator

Organisasi Internasional memiliki peran untuk menjalin kerja sama untuk menyelesaikan dan mencari solusi bersama atas konflik yang terjadi, kerja sama ini bisa dilakukan bersama organisasi internasional lain atau aktor non negara seperti komunitas internasional.

b. Determinator

Organisasi Internasional memiliki peran dalam pengambilan keputusan terhadap sebuah permasalahan yang terjadi.

c. Fasilitator

Organisasi Internasional memiliki peran untuk memberikan fasilitas dan layanan yang baik untuk tercapainya misi bersama.

d. Mediator

Organisasi Internasional memiliki peran untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik antar anggota.

Dalam menjawab rumusan masalah pada skripsi ini, terdapat empat peran yang relevan dengan pelaksanaan tugas IOM di India, yaitu Inisiator, Determinator, Fasilitator dan Mediator. Peran Inisiator mengacu pada kolaborasi IOM dengan pihak lain dalam menangani permasalahan migran di India, salah satunya contohnya IOM berkolaborasi dengan UNHCR, Pemerintah India, serta PBB untuk memastikan keamanan bagi migran. Peran determinator mengacu kepada wewenang IOM dalam memutuskan solusi untuk penyelesaian kasus CAA 2019 bersama UNHCR.

Peran fasilitator mengacu kepada penyediaan fasilitas pelatihan dan program bagi migran, salah satunya Migrant in Countries in Crisis & Voluntary Return and Re-Integration yang mengatur mengenai migran yang terdampak perang, migran yang kehilangan kewarganegaraan serta migran yang ingin kembali ke negara asal. Serta Peran Mediator IOM dimana IOM bertindak sebagai aktor independent yang melakukan mediasi terhadap sengketa migran.

#### D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis untuk menjawab masalah diatas, maka penulis mengambil hipotesis mengenai strategi IOM yaitu:

1. **Kerja sama dengan Aktor Pemerintah:** Melalui kolaborasi dengan Aktor pemerintah, IOM dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan migran dan praktek terbaik dalam pengelolaan migrasi.
2. **Dialog dan diplomasi:** IOM dapat berperan sebagai mediator dalam dialog antara pemerintah India, kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh CAA., dengan Membuka dialog yang terbuka dan konstruktif bersama berbagai Stakeholder.
3. **Fasilitas dan Bantuan langsung kepada kelompok terdampak:** IOM dapat memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang terdampak oleh CAA, termasuk migran dan pengungsi yang mungkin menghadapi kesulitan akibat undang-undang tersebut.

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan peran International Organization for Migration (IOM) dalam menangani kasus migran muslim di India pasca terbitnya kebijakan Citizenship Amandement Act 2019.

### **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan telaah data dan berbagai literatur seperti buku, artikel dari berbagai media yang terkait dengan topik yang dibahas penulis, hingga jurnal nasional dan internasional.

Berkaca dari hal ini, kemudian penulis berusaha untuk menggunakan metode Analisa kualitatif melalui studi kasus. Hal ini akibat penulis melakukan penelitian secara spesifik terhadap program peranan IOM dalam kasus migran illegal di India yang terpengaruh perubahan kebijakan, dengan cara mengumpulkan sumber informasi yang dapat menjelaskan kasus tersebut secara detail.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tema dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menetapkan jangkauan penelitian difokuskan pada peran International Organization For Migration (IOM) dalam menangani perlindungan hak-hak imigran setelah pengesahan Undang-Undang CAA 209. Data yang diambil dari tahun 2018-2020 dimana proses perumusan serta perkembangan kebijakan ini berkembang.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab untuk menjelaskan topik penelitian yang berjudul “Peran *International Organization for Migration* (IOM) setelah pengesahan CAA 2019 India. Bab 1 penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 penulis akan menguraikan fenomena yang akan diteliti dan terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu sejarah CAA, sejarah migran Afghanistan di India, serta menjelaskan secara ringkas mengenai peranan IOM di India

Bab 3 penulis akan menguraikan mengenai peran IOM di India setelah pengesahan CAA, program kerja IOM, kerjasama dengan PM India, serta kolaborasi IOM dengan UNHCR dalam penyelesaian sengketa ini.

Bab 4 berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, serta akan menjelaskan hasil dari data yang sudah dianalisis pada bab-bab sebelumnya.